

PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI DAMPAK TEKNOLOGI DIGITAL DAN PANDEMI COVID 19, SERTA TANTANGAN DAN PELUANGNYA DI INDONESIA

Oleh:

Meirinaldi

Email : meirinaldi.2505@gmail.com

Dosen Pascasarjana, Universitas Borobudur

ABSTRAK

The Digital Cooperation coming up this new era is promoted by GAF A (Google, Apple, Facebook and Amazone) are the examples from economic digital. But there is a word offline for logistic sector, food, healthy beside of digital economics. These is help to they exist.

The research in Indonesia are indicate the Unicorn Corporation star up (valuation value to 1 million \$ or Rp. 14,5 Triliyun)) has to contribution for economics value on they market.

This fenomena is indicates by digitalization and rapidly by Pandemi covid 19. This is a challenges for the consumer. But to give the opportunity for potential producent and to national economics growth.

PENDAHULUAN

Terpatahkannya asumsi faktor Residual/Epsilon (dalam semua penelitian dunia akademisi) sebagai faktor yang tidak signifikan, oleh fenomena merebaknya virus Korona terhadap perputaran roda perekonomian, sedang menjadi bukti dan fenomena yang sama-sama dialami penduduk dunia, yang ditandai dengan mulai munculnya fenomena “panic buying” dan “pembatalan berbagai even ekonomi, olah raga, seni dan aktivitas sosial lainnya.

Senin, 2 Maret 2020 lalu, pasien pertama penyakit akibat virus corona Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah menjalankan beberapa protokol, dari membuka layanan call center, pencegahan, pemeriksaan, pemantauan, hingga perawatan di rumah sakit rujukan. Pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat tentang Covid-19 agar masyarakat bersama-sama menjaga kesehatan dan memeriksakan diri apabila mengalami gejala serupa. Dalam jangka pendek, protokol pencegahan dan penanganan menjadi prioritas.

Lebih dari 100 tahun silam, dunia pernah mengalami serangan masif virus influenza yang menginfeksi sekitar 27 persen penduduk dunia. Pandemi ini dikenal dengan nama flu Spanyol. Berbeda dengan flu Spanyol, Covid-19 terjadi ketika rantai produksi dan sistem transportasi antarnegara sudah semakin terhubung dan didukung revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang semua orang bisa mengetahui secara real time, misalnya, melalui Johns Hopkins CSSE, jumlah orang yang terinfeksi menurut negara, serta jumlah yang selamat dan tidak selamat. Kondisi Perang Dunia I dan tingkat teknologi membuat data flu Spanyol terbatas dan sangat bervariasi. Sekarang tantangan bukan terletak pada kualitas data, melainkan kemampuan memilih informasi agar terhindar dari hoaks yang dapat memicu kekhawatiran yang tidak perlu. Informasi valid tentang Covid-19

disediakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO.

Covid-19 akan memperlemah ekonomi dunia. Ekonomi Cina, negara besar yang ekonominya selalu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan dunia, diperkirakan akan tumbuh di bawah 6 persen. Pertumbuhan ekonomi dunia, yang sudah melemah sejak 2019, akan semakin lemah, dari 2,9 persen ke 2,4 persen (OECD, 2 Maret). Menurut laporan ini, secara umum negara-negara akan mengalami penurunan pertumbuhan berkisar -0,1 persen hingga -1,1 persen.

BAHAN DAN METODE

Dampak Covid 19 Terhadap IPM

Indeks pembangunan manusia adalah bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990, IPM terdiri atas unsur : pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli) dan ke tiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama yang lain. Sehingga dengan demikian IPM merupakan alat ukur yang peka untuk dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi, terutama pada komponen daya beli. Disamping menurut Maulana dan Bowo, 2013, Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk keberhasilan pembangunan.

Pada tahun 2020, pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia hanya tumbuh sebesar 0,03 persen, jauh melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 0,74 persen. Jika dibandingkan dengan angka nasional, terdapat 11 provinsi yang memiliki capaian IPM di atas angka nasional. Capaian IPM tertinggi masih diraih oleh Provinsi DKI Jakarta (80,77), sedangkan capaian terendah ditempati Provinsi Papua (60,44). Melambatnya pertumbuhan IPM

ini disebabkan penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili dengan variabel pengeluaran riil per kapita, dimensi umur panjang dan hidup sehat dan pengetahuan yang diwakili dengan variabel Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih meningkat meskipun pertumbuhannya melambat.

Dampak Covid 19 Terhadap Sektor Pariwisata

Akibat pandemi covid 19 juga sangat berdampak signifikan pada sektor pariwisata, karena mobilitas orang dibatasi. Berdasarkan data BPS (2021), terdapat penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan (lokal maupun mancanegara). Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,02 juta kunjungan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar 75,03 persen. Penurunan ini akan mengancam 13 juta pekerja di sektor pariwisata dan 32,5 juta pekerja yang secara tidak langsung terkait sektor pariwisata (BPS, 2020). Dan pada akhirnya kondisi tersebut akan mempengaruhi penerimaan devisa negara. Penurunan devisa negara diperkirakan 80 persen (Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).

Dampak Covid 19 Pada Produktivitas Kerja

Keadaan tahun 2020-2021 banyak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap produktivitas kerja, hal ini disebabkan oleh pemerintah membatasi pergerakan aktivitas masyarakat dan pekerja bekerja dari rumah yang diistilahkan dengan work from home (WFH). Beberapa peneliti mencoba

melihat pengaruh WFH terhadap produktivitas karyawan dan hasil yang diperoleh adalah berpengaruh positif dan signifikan (Bintang Narpati et al, 2021). Disamping itu, Rahmi Susanti et al (2021) melakukan penelitian terhadap perbedaan WFH (work from home) dan WFO (work from office) dan hasilnya adalah tidak ada perbedaan produktivitas kerja pada Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) di masa pandemi di bidang pendidikan, I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra and Haevita Astriena Natalia (2021); Work From Home berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan.

Untuk mengatasi dampak pandemi covid-19, terutama dalam mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat, mengurangi risiko PHK dan mempertahankan produktivitas ekonomi, presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan telah menginstruksikan beberapa hal; (1) Memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi,. (3) Pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah, (4) Program Padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipat gandakan, dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman satu sama lain, (5) Memberikan tambahan sebesar Rp 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama enam bulan, (6) Mempercepat implemntasi kartu pra-kerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan, dan penugusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzetnya, (7) Membayarkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang selama ini

dibayar oleh wajib pajak (WP) karyawan di industri pengolahan, (8) Memberikan relaksasi kredit di bawah Rp 10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non bank, (9) Masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi, akan diberikan stimulus. Kesemua instruksi tersebut diatas akan berlaku efektif tentunya sangat ditentukan oleh pemilihan kebijakan dan kesigifan dari pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Peluang Dan Tantangan

Transmisi penurunan pertumbuhan ekonomi dimulai dari penurunan impor yang dibutuhkan ekspor dan perlambatan arus investasi asing jangka panjang yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penurunan ekspor Indonesia sangat dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi Cina karena, selain sebagai negara tujuan utama ekspor nasional, Tiongkok adalah salah satu importir terbesar dunia untuk primadona ekspor nasional, seperti minyak dan gas, minyak sawit, serta karet alam.

Belum pernah terjadi sebelumnya, selain saat perang dunia, tekanan ekonomi dunia secara masif pada sisi pasokan. Inti dari sisi suplai adalah produksi, dan inti dari produksi adalah sumber daya manusia. Dapat dibayangkan, ketika inti dari inti pertumbuhan ekonomi, yaitu sumber daya manusia, terkena ancaman virus, seluruh kegiatan ekonomi, dari pengolahan bahan mentah, produksi barang setengah jadi dan barang jadi, jasa pengangkutan barang, investasi fisik, hingga mobilitas orang, akan menurun. Teknologi kecerdasan buatan tidak mampu berjalan ketika the

real intelligence, yaitu manusia, tengah menghadapi masalah.

Dari sisi pariwisata, tutupnya beberapa pusat produksi dunia dan tertundanya investasi asing akan menurunkan jumlah perjalanan bisnis dan menggerus keuntungan usaha transportasi, hotel, dan restoran. Pada 2019, wisatawan asal Cina merupakan turis mancanegara terbesar di Indonesia dengan jumlah kunjungan 2,1 juta orang atau sekitar 14 persen dari total turis mancanegara yang masuk ke Indonesia.

Covid-19 secara sekaligus menurunkan arus barang, jasa, dan orang. Dari sisi ekonomi, apa yang harus dilakukan pertama kali jika ancaman virus ini dapat diatasi? Jawabannya adalah investasi. Mengapa? Karena investasi mendorong aktivitas produksi, seperti ekspor, impor, menyerap lapangan kerja, dan menciptakan arus perjalanan bisnis.

Saat jaringan produksi dunia kembali normal, Indonesia berpotensi menerima peralihan investasi dunia, seperti untuk tekstil, pakaian, alas kaki, perhiasan, sepeda, suku cadang otomotif, dan elektronik. Sebuah pelajaran berharga dari Covid-19 adalah Indonesia harus segera meningkatkan kemampuan agar menjadi bagian besar dalam jaringan produksi dunia untuk barang setengah jadi, industri hulu seperti kimia, dan mesin untuk industri hilir.

Peran pemerintah sangat penting untuk mendorong masuknya investasi yang mendukung transformasi ekonomi nasional. Kontribusi nilai tambah manufaktur terhadap ekonomi nasional diharapkan dapat kembali di atas 25 persen dengan sektor manufaktur berorientasi ekspor mampu tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika sektor manufaktur mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa, ekonomi nasional akan tumbuh lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan saat ini. Pada akhirnya, terpaan ini mengingatkan kita bahwa roda ekonomi Indonesia harus terus berjalan maju.

Pandemi Covid-19 telah menyiratkan perlunya bentuk baru tata kelola digital untuk mendukung konsumen di seluruh provinsi

Republik Indonesia, bahkan issue ini telah menjadi isu umum untuk kepentingan masyarakat global. Kebijakan konsumen digital harus sesuai untuk dunia yang lebih digital dan berkelanjutan serta harus dapat mengatasi ketidaksetaraan di dunia pasca Covid-19. Pemerintah Indonesia bahkan di tingkat pemerintahan di seluruh dunia telah menunjukkan tindakan yang nyata dan tegas untuk mengatasi pandemi Covid-19 untuk segera dapat berakhir. Selain berbagai tindakan untuk menjaga kesehatan masyarakat, pembuat kebijakan telah berfokus pada mendukung perusahaan untuk mencegah kebangkrutan skala besar.

Kebijakan moneter bank sentral serta program khusus yang telah dilakukan pemerintah adalah dalam rangka untuk memperkuat stabilitas makroekonomi dalam krisis dan melindungi jatuhnya perekonomian nasional. Di sisi lain, selain guncangan perekonomian secara umum, Covid-19 telah membawa gangguan besar pada kehidupan sehari-hari dan sangat merusak pola hidup dan perilaku konsumen dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Banyak konsumen yang menderita karena anggaran yang terbatas akibat dampak dari Covid-19, antara lain yang berasal dari dampak pengangguran atau kesempatan kerja yang terbatas dan berjangka pendek; dimana mereka banyak berjuang untuk memenuhi biaya kredit, membayar sewa, atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari.

Banyak negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi konsekuensi pandemi bagi konsumen, seperti pengurangan pajak pertambahan nilai atau penuntutan pelanggaran konsumen, seperti persaingan tidak sehat, misalnya. Tetapi sementara langkah-langkah tersebut membantu untuk peningkatan ketidaksetaraan global yang dilakukan secara signifikan dan terus menerus guna melindungi kepentingan konsumen yang sangat rentan dengan

dampak pandemi Covid-19 yang masih belum menunjukkan tanda-tanda bakal mereda dalam waktu dekat. Dalam hal kegigihan, rentang waktu krisis terlihat tampak jelas: jumlah kasus telah meningkat karena “gelombang kedua” di banyak negara pada akhir tahun 2020; disusul gelombang ketiga di tahun 2021; dan di awal tahun 2022, muncul varian baru Omicron, yang tingkat penyebarannya konon jauh lebih ganas. Dalam hal peningkatan ketidaksetaraan, satu hal yang jelas: tidak seperti kebanyakan negara Barat atau negara ekonomi maju lainnya, negara berkembang layaknya seperti Indonesia, tidak memiliki ruang fiskal untuk mendorong ekonomi dengan program stimulus yang mahal dan melindungi konsumen dari kehilangan pekerjaan dan pendapatan dalam skala besar. Dengan demikian, ketimpangan antar negara kemungkinan akan meningkat lebih tajam akibat wabah pandemi Covid-19.

Ketidaksetaraan di dalam negeri antara konsumen dapat meningkat cukup signifikan, salah satu alasannya adalah adanya fenomena transformasi digital. Sebagai konsekuensi dari krisis, banyak pengusaha, baik swasta maupun publik, atau bahkan BUMN, sudah atau akan berinvestasi dalam infrastruktur digital mereka. Perkembangan ini mungkin sebagian besar akan menguntungkan konsumen perkotaan yang berpendidikan tinggi, karena beberapa kota besar telah menjadi pusat model bisnis digital. Konsumen yang lebih rentan, seperti mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau di kota-kota yang kurang didukung oleh infrastruktur digital (internet), tidak akan terkena investasi besar dalam kemampuan digital di sekitar mereka. Selain itu, banyak dari konsumen yang rentan tersebut mungkin takut bahwa pekerjaan mereka dapat menjadi usang dengan meningkatnya digitalisasi.

Munculnya Platform Digital Dan Kekuatan Pasar: Beban Bagi Konsumen

Terdapat perkembangan lebih lanjut yang luar biasa terkait dengan percepatan akibat pandemi Covid-19 dalam penggunaan layanan digital: peran platform digital yang semakin penting, misalnya konsumen untuk

membeli makanan, melalui platform GoFood, belanja buku melalui Layanan digital platform Tokopedia, atau pembelian tiket dan reservasi hotel melalui Traveloka, yang semata-mata untuk mengurangi banyak proses berinteraksi secara fisik yang memerlukan biaya ekstra, dan penghindaran risiko kesehatan di tengah pandemi saat ini. Di sisi lain, sangat jelas bahwa platform digital dapat bekerja dengan baik untuk banyak konsumen mengingat potensi transparansi yang lebih baik, harga yang lebih rendah, dan kenyamanan yang lebih baik. Selain itu, platform digital tentu dapat memainkan peran yang berguna selama pandemi ketika belanja fisik harus dihindari. Tetapi ekonomi digital juga membutuhkan perlindungan konsumen dan perlindungan data yang lebih kuat, dimana platform digital dengan kekuatan pasar yang besar menjadi lebih dominan dan sukses ditengah-tengah hidup berdampingan dengan virus corona.

Pemberdayaan Konsumen Untuk Tata Kelola Digital Yang Lebih Baik

Secara keseluruhan, implementasi Agenda Konsumen tersebut di atas adalah upaya yang baik tentang bagaimana kerangka kebijakan harus menggabungkan manfaat bagi konsumen dari model bisnis digital dan perlindungan tingkat tinggi yang diperlukan untuk memberdayakan konsumen. Hanya dengan cara ini negara dapat hadir dalam rangka membantu konsumen di tengah wabah pandemi Covid-19 yang masih belum mereda. Dengan demikian pemerintah dapat menentukan seberapa baik pemerintah bersama masyarakat, khususnya konsumen yang renta terhadap kekuatan platform digital dapat keluar dari krisis.

Dalam arti yang lebih luas, hal ini juga akan menentukan sentimen warga pasca-pandemi khususnya, apakah mereka merasa bahwa pembuat kebijakan menyeimbangkan kepentingan konsumen

dan bisnis. Dengan demikian, perlu dicatat bahwa kebijakan konsumen juga merupakan masalah kohesi sosial dan dengan demikian relevan dengan keadaan masyarakat sipil di seluruh dunia. Pada cakrawala yang lebih luas, fokus kebijakan konsumen harus pada pemberdayaan konsumen secara luas, memberi mereka suara dan pengaruh yang memadai dalam membentuk tata kelola digital, yang pada akhirnya akan kondusif bagi kelangsungan perekonomian nasional yang kuat dan berkesinambungan. Pemberdayaan seperti itu di bidang digital akan semakin penting karena dunia menjadi lebih fokus pada digitalisasi dan lingkungan yang berkelanjutan setelah Covid-19. Dengan strategi yang tepat, "new normal" bisa sangat bermanfaat bagi konsumen dan perekonomian secara keseluruhan.

Saat ini memang kecenderungannya sebagian besar konsumen di Indonesia, khususnya yang tinggal di perkotaan besar, bahkan seluruh dunia akan mengalihkan pola konsumsi ke wilayah online, yang kemungkinan besar akan memperkuat platform online. Selain perlindungan data digital, perlu juga ditingkatkan transparansi dan literasi digital konsumen, terutama dalam hal penggunaan data dalam layanan digital yang seringkali tidak jelas, dan merugikan konsumen, misalnya penggunaan data pribadi konsumen yang dapat diakses oleh pihak lain secara ilegal. Hal ini secara kasat mata sering terjadi manakala platform digital dan perusahaan teknologi telah memperoleh kekuatan pasar yang sangat signifikan, terutama melalui efek jaringan internet Online.

Meningkatnya dominasi perusahaan digital secara drastis akhir-akhir ini, yang umumnya dimotori oleh "GAFA" (Google, Apple, Facebook dan Amazon) adalah contoh utama dari perkembangan ini. Meskipun tampaknya ada fokus yang kuat pada platform digital dalam debat publik, kita juga harus fokus pada dunia offline. Rantai nilai perusahaan di sektor-sektor seperti logistik, makanan, dan kesehatan semakin terdigitalisasi, yang tampaknya telah membantu perusahaan-perusahaan yang sudah dominan di sektor-sektor ini untuk terus berkembang. Penelitian

baru di Indonesia khususnya menemukan bahwa konsentrasi pasar dan kekuatan pasar di seluruh industri telah meningkat di banyak sektor, karena "perusahaan Unicorn" (merupakan istilah yang diberikan kepada startup yang memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14,2 triliun) telah mengambil bagian lebih besar dari kue ekonomi di pasar masing-masing.

Sangat jelas bahwa peningkatan kekuatan pasar perusahaan platform digital seperti Gojek, Tokopedia, dan yang tergolong perusahaan Unicorn lainnya, dapat mencegah perusahaan baru yang inovatif memasuki pasar, dan dengan demikian menekan persaingan dan inovasi. Ini tidak hanya buruk bagi kepentingan konsumen. Ketika perusahaan sekelas Unicorn tersebut menjadi terlalu dominan, mereka dapat menetapkan satu-satunya standar untuk perlindungan konsumen dalam hal peningkatan penggunaan data digital dalam model bisnis. Menjadi jelas bahwa baik digitalisasi (sebagian dipercepat oleh adanya wabah pandemi) serta pendapatan yang lebih rendah dan kehilangan pekerjaan karena Covid-19 memberikan tekanan berat pada konsumen.

Sebaliknya, dalam pandangan umum, apabila kepercayaan konsumen menjadi lebih besar maka dapat membuka jalan keluar dari krisis akibat tekanan berat sebagai dampak dari krisis pandemi Covid-19. Ada beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan dari sudut pandang kepercayaan konsumen yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan, yaitu;

Pertama, kepercayaan konsumen akan menjadi kunci pemulihan yang cepat. Hanya dengan meningkatnya kepercayaan konsumen, maka perusahaan dan perekonomian secara nasional dapat segera pulih. Secara umum kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen di dalam negeri belum kembali dari titik terendahnya setelah merebaknya pandemi di awal tahun 2020 dan tetap jauh

di bawah rata-rata jangka panjang akan berakhirnya pandemi setelah ditemukan vaksin penawarnya (tahap 1 dan 2), hingga penggalakan vaksin Booster (tahap 3).

Kedua, konsumen sangat terpuak adanya dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Mereka yang tinggal di seluruh pelosok negeri yang terkena dampak terburuk atau yang bekerja di banyak layanan seperti pariwisata, contohnya seperti dampak pandemi Covid-19 terhadap pariwisata di Bali, sangat memporakporandakan tatanan ekonomi masyarakat yang sangat tergantung dari kedatangan turis baik domestik maupun asing.

PENUTUP

Perhatian pemerintah dan dukungan sosial yang berpihak pada konsumen akan menjadi penting untuk menjaga ketidaksetaraan yang sudah meningkat. Dengan latar belakang ini, kita harus bertanya bagaimana kerangka kebijakan berorientasi konsumen yang sesuai, yang dapat menggabungkan tata kelola digital dan perlindungan konsumen untuk menjadikan konsumen sebagai prioritas kebijakan utama. Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan adalah berupa kebijakan konsumen yang umumnya dikenal sebagai Agenda Konsumen yang menyoroti area penting dari pembelajaran akibat dampak pandemi Covid-19 selama ini, dimana kebijakan konsumen membutuhkan tindakan segera sebagai penangkal pandemi. Rekomendasi dari proses Agenda Konsumen yang dapat diimplementasikan adalah antara lain:

- **Peningkatan perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan.** Kajian ini harus disesuaikan dan disempurnakan dengan era digital saat ini dengan tetap memastikan tingkat perlindungan konsumen yang tinggi. Kajian tersebut juga harus mengkaji risiko utang berlebih pada saat krisis.
- **Mengatasi kerentanan konsumen.** Banyak konsumen di dalam negeri, bahkan di tingkat global sekali pun, saat ini banyak kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan pendapatan yang cukup besar. Akibatnya, konsumen menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban kredit finansial, dan

banyak yang berada dalam situasi rentan dan terlilit hutang. Masalah ini perlu diatasi untuk berbagi praktik dan informasi terbaik, dan untuk menemukan solusi bersama bagi konsumen. Pendekatan yang memungkinkan dapat mencakup mempromosikan sikap keterbukaan (inklusi), memberdayakan konsumen mengenai hak-hak mereka melalui kampanye kesadaran yang mendukung konsumen, dan mengembangkan sarana umum yang dapat meningkatkan pengalaman konsumen.

- **Perlindungan konsumen pada platform digital.** Karena peningkatan yang cukup besar dalam penawaran platform digital, terdapat risiko penipuan, hal-hal yang menyesatkan, dan tidak mematuhi hukum dan regulasi di e-commerce dan adanya platform digital penjualan online dan “toko palsu”, platform digital tersebut harus memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk menangani penawaran yang tidak sesuai secara hukum dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu sangatlah penting diimplementasikan Undang-Undang Layanan Digital oleh pihak berwenang dalam rangka untuk memperkenalkan tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi khususnya untuk platform digital online skala besar. Selain langkah-langkah pengaturan ini, perluasan informasi berbasis kualitas dan penawaran wawasan ekonomi digital bagi konsumen dapat bermanfaat, untuk secara terus menerus dicanangkan. Selanjutnya, langkah-langkah administratif dan peraturan untuk memperkuat persaingan antar platform digital sehingga konsumen memiliki kebebasan memilih juga perlu harus dipertimbangkan. Namun demikian, tanggung jawab platform digital dan penjual harus tetap dapat dibedakan dengan jelas.
- **Mempromosikan konsumsi yang berkelanjutan.** Beberapa konsumen

mengubah gaya hidup dan pola konsumsi mereka dalam menghadapi krisis, seringkali dengan efek ramah lingkungan. Di luar masa krisis, konsumen harus didorong untuk menjadi aktor dalam transisi hijau. Hal ini membutuhkan solusi inovatif, kerangka hukum yang memadai yang mempromosikan umur produk yang panjang dan dapat diperbaiki, informasi yang sesuai, dan pendidikan konsumen. Konsumsi berkelanjutan tidak harus bergantung pada pendapatan, tetapi harus dapat diakses oleh semua orang.

- **Hak perjalanan dan penumpang.** Di masa lalu, konsumen telah berulang kali mengalami pengalaman menyakitkan dengan kebangkrutan perusahaan dan perlindungan kebangkrutan yang tidak memadai. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah dan bagaimana perlindungan kepastian dapat ditingkatkan di bidang transportasi, khususnya bagi perusahaan angkutan udara.
- **Tinjauan Petunjuk tentang Keamanan Produk Umum.** Tinjauan terhadap keamanan produk umum harus dilakukan dengan melihat tantangan yang dibawa oleh teknologi baru dan penjualan online untuk memastikan keamanan produk konsumen non-makanan, penegakan yang lebih baik dan pengawasan pasar yang lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintang Narpati, Indra Lubis, Kardinah Indriana Meutia, Endah Prawesti Ningrum, 2021; **Produktivitas Kerja Pegawai yang Dipengaruhi oleh Work From Home (WFH) dan Lingkungan Kerja Selama Masa Pandemi**, JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma), Vol.4, No.2, p. 121-133.
- I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra and Haevita Astriena Natalia (2021); **Perubahan pada Lingkungan Kerja selama Pandemi : Dampaknya terhadap Produktivitas Karyawan**, Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol. 4 no. 1, p. 300-308.
- Kiki Verico ; dalam Tempo.Co, *Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, serta Dosen FEB UI*
- Maulana R & Bowo P. A (2013); **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pendidikan dan Tehnologi Terhadap IPM Propinsi di Indonesia 2007-2011**, Journal Of Economics & Policy 6 (2), p. 163-169.
- OECD (2020). **Coronavirus (COVID-19): SME policy responses**. Available at: <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/> (Accessed: January 24, 2022).
- Pratiwi, A.M., G., Tureah, G.G., Vanya, H., Irawan, K.I., Adirespati, S. and Eke, Z. (2020). **Kumpulan Rekomendasi Kebijakan: Penanganan Krisis Multidimensi Pandemi COVID-19**, Knowledge Sector Society, Available at: <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2021/01/ksi1611332690.pdf> (Accessed on January 24, 2022).
- Rahmi Susanti, Dinda Tasya Amelia, Fina Damaiyana, Oryza Regina Bernadine Santoso, (2021); **Produktivitas Kerja Saat Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) pada Dosen FKM Universitas Mulawarman di Masa Pandemi Covid -19**, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Volume 13 Edisi 1, p. 28-33.
- Sukirno, Sadono. (2006). **Makro Ekonomi Teori Pengantar**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Schaefer, M. (2020). **Life or livelihoods? Indonesia's social policy response to COVID-19**. Available at: <https://socialprotection.org/discover/blog/life-or-livelihoods-indonesia%E2%80%99s-socialpolicy-response-covid-19> (Accessed: January 24, 2022).
- Sudarno, S. (2020). **Weathering the Storm: Poverty and Indonesia's Social**

- Protection System Amidst the COVID-19 Pandemic. Asia Health Policy Program (AHPP) 2020-21 Colloquium series “Health, medicine, and longevity: Exploring public and private roles, Freeman Spogli Institute for International Studies. Stanford University. <https://fsi.stanford.edu/events/weathering-stormpoverty-and-Indonesia%E2%80%99s-social-protection-system-amidst-covid-19-pandemic> (Accessed: January 24, 2022)
- Suryahadi, A., Izzati, R. A. & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. Available at: https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_covid19impact_draft.pdf (Accessed: January 24, 2022).
- The Asian Development Bank (2020). Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020: The Asian Development Bank. Available at: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/650251/asia-sme-monitor-2020-Volume-2.pdf> (Accessed: January 24, 2022).
- Todaro, Michael P. and Smith, Stephen C (2003). **Economic Development**. UK: Pearson Education Limited.